

ANALISIS KEBUTUHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM SEKOLAH PENGGERAK DI SDIT AL-AMIN KAPUAS

Sukaryati*

Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, Indonesia
Mamahnazwa61@gmail.com

Siminto

Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, Indonesia
siminto@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

This study aims to obtain a map of the implementation needs of the driving school curriculum at SDIT Al-Amin Kapuas. Implementation is an action or implementation of a plan that has been prepared carefully and in detail. Implementation is usually done after planning is considered perfect. The objectives of this research are: (1) To describe the implementation of the driving school curriculum at Al-Amin Kuala Kapuas Integrated Islamic Elementary School, (2) To analyze the supporting and inhibiting factors for implementing the driving school curriculum at Al-Amin Kuala Kapuas Integrated Islamic Elementary School , (3) To analyze and describe the steps taken by the school to minimize the inhibiting factors for the implementation of the driving school curriculum at Al-Amin Kuala Kapuas Integrated Islamic Elementary School. Techniques in data collection namely observation, interviews and documentation. Qualitative data analysis. Data analysis techniques in this study are data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Checking the validity of the data in this study used triangulation techniques. From the description above it can be concluded several things as follows; 1) The steps taken in implementing the curriculum are planning, making goals, making supporting programs, supervising, evaluating success. 2) There are several factors supporting and inhibiting the implementation of the curriculum including 1) Readiness of educators, 2) Readiness of educational staff, 3) Condition of supporting facilities and infrastructure, 4) Readiness of students, 5) Impact of implementation. 3) The need for special steps or handling by the school in overcoming the inhibiting factors of curriculum implementation so that the curriculum implementation is effective.

Keywords: *Implementation of Curriculum, Driving School.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan peta kebutuhan implementasi kurikulum sekolah penggerak di SDIT Al-Amin Kapuas. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah: (1) Untuk

mendesripsikan implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas, (2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas, (3) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir faktor penghambat implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas. Teknik dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data secara kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik triangulasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; 1) Langkah yang dilakukan dalam Implementasi kurikulum yaitu membuat perencanaan, membuat tujuan, membuat program pendukung, melakukan pengawasan, mengevaluasi keberhasilan. 2) Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum di antaranya 1) Kesiapan pendidik, 2) Kesiapan tenaga kependidikan, 3) Keadaan sarana dan prasarana pendukung, 4) Kesiapan peserta didik, 5) Dampak implementasi. 3) Perlunya langkah atau Penanganan khusus yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kurikulum agar keefektifan implementasi kurikulum.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Sekolah Penggerak.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1). Sedangkan tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3).

Untuk memnuhi makna dan tujuan pendidikan tersebut tentunya diperlukan sebuah kurikulum yang tepat, yang dapat menunjang dan mengarahkan proses pendidikan kearah yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19).

Dengan demikian tanpa adanya Kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman Kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak.

Di Indonesia sendiri pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan hingga sampai saat ini. Sejak tahun 2019, mulai diterapkannya kurikulum berbasis tiga aspek penilaian yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek ketrampilan dan aspek sikap, kurikulum tersebut bernama kurikulum 2013. Akan tetapi, pengimplementasian kurikulum 2013 tersebut menuai adanya pro dan kontra sehingga pengimplementasiannya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Di mana dalam kurikulum 2013 lebih berfokus kepada proses peserta didik itu sendiri, bagaimana mereka mampu meningkatkan dan menjaga keseimbangan antara attitude, skill maupun *knowledge* yang mereka miliki, sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks dalam suatu pengimplementasian kurikulum. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah telah merumuskan satu system pendidikan baru yang bertajuk Merdeka belajar.

Merdeka belajar ini merevitalisasi sistem pendidikan untuk membangun kemampuan atau kompetensi utama supaya kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Pada katagori pedagogi, merdeka belajar mendorong berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum, dan penilaian, serta pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada peserta didik. Pada katagori kurikulum, Merdeka Belajar membentuk kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter, sedangkan pada katagori sistem penilaian, Merdeka Belajar menghadirkan penilaian yang bersifat formatif, serta berdasarkan portofolio (www.kemdikbud.go.id).

Munculnya kurikulum baru tersebut tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum tersebut, salah satunya adalah tantangan terkait proses adaptasi yang harus dilakukan oleh sekolah baik oleh pendidik, tenaga kependidikan dan siswa sebagai subjek dari pendidikan itu sendiri. Dari keadaan ini tentu juga muncul permasalahan lain yang dapat menghambat proses adaptasi tersebut di antaranya adalah keadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran dan kesiapan pendidik terkait kualifikasi dan kapasitas yang dimiliki.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut tentu tidak banyak sekolah yang langsung dapat beradaptasi dan menerapkan kurikulum baru tersebut dengan baik, salah satu contohnya adalah di Kabupaten Kapuas, di Kabupaten ini berdasarkan SK 0301/C/ HK.00/2022 hanya terdapat satu sekolah tingkat dasar yang berhasil lolos

seleksi menjadi sekolah penggerak. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kapuas hanya ada satu sekolah tingkat dasar yang benar mampu beradaptasi dan menerapkan kurikulum baru tersebut dengan baik yaitu SDIT Al-Amin Kapuas.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kepala sekolah SDIT Al-Amin Kapuas, terkait terpilihnya sekolah SDIT Al-Amin menjadi sekolah penggerak diketahui bahwa SDIT Al-Amin Kapuas terpilih sebagai sekolah penggerak disebabkan kesiapan yang dimiliki terutama dari segi sarana-prasarana, kualifikasi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta manajemen yang baik yang dimiliki sekolah. Menurut kepala sekolah pelaksanaan kurikulum baru ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dikatakan berhasil meskipun terdapat beberapa kendala yang masih perlu dilakukan perbaikan. Karena untuk menjadi sekolah penggerak banyak sekali tahapan yang harus dilalui salah satu contohnya adalah bagi tenaga pendidik yang lolos sebagai guru penggerak masih harus mengikuti kegiatan lanjutan semacam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guna menunjang tugas yang akan dibebankan pada tenaga pendidik tersebut.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai permasalahan tersebut, dengan harapan nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah-sekolah lain agar dapat mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah penggerak, berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu "Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak di Sdit Al-Amin Kapuas".

KAJIAN LITERATUR

1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu observasi, wawancara, Jurnal penelitian yang ditulis Angga dkk dengan judul Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar pada tahun 2022. dan dokumentasi. Validasi data pada penelitian menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 memiliki konsep yang baik dalam proses pendidikan. Akan tetapi, implementasi di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara, implementasi Kurikulum Merdeka di beberapa Sekolah Penggerak dilaksanakan di tahun pertama dengan cukup baik, kemudian dikembangkan di banyak sekolah tahun sekarang. Beberapa sekolah masih merancang formula yang tepat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka implementasi Kurikulum Merdeka setelah dianalisis lebih baik dan sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia daripada Kurikulum 2013. Namun demikian, beberapa hal haruslah menjadi pertimbangan pemangku kebijakan dan pelaksana pendidikan, sehingga Kurikulum Merdeka

dapat diimplementasikan dengan tepat serta menyempurnakan Kurikulum 2013, bukan sekadar program yang dipaksa diterapkan dalam pendidikan di Sekolah Dasar, khususnya di Kabupaten Garut (Angga dkk, 2022).

2. Tesis yang ditulis Dwi Efyanto dengan judul Analisis Penarapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Kurikulum SMK pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa: 1) Penerapan kebijakan merdeka belajar pada kurikulum SMK dengan melaksanakan sistem pendidikan pada ranah input, proses, dan output. 2) Hambatan penerapan merdeka belajar dari ketiga SMK meliputi, a) Pemenuhan kompetensi industri memerlukan peningkatan kompetensi guru yang terprogram, b) Guru belum mempunyai pengalaman lapangan dalam penerapan kompetensi industry, c) Perubahan standar kompetensi industri yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai; d) Kesulitan memfasilitasi pembelajaran dengan efektif sesuai dengan budaya industry. 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang ada dari penerapan merdeka belajar adalah a) Membuat program kesepakatan kerjasama antara SMK dengan pihak Industri, b) Mengembangkan metode pembelajaran yang mampu menciptakan nuansa kerja seperti di perusahaan, c) Sinkronisasi kurikulum dengan industri rekanan untuk penyusunan kurikulum pembelajaran otomotif; d) Meningkatkan kompetensi guru dalam konteks pemenuhan harapan industri (Dwi Efyanto, 2021).

3. Jurnal penelitian yang ditulis Ineu Sumarsih dkk., dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kurikulum merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, yang menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Memupuk kerja sama dengan guru-guru yang mendukung pemimpinya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak (Ineu Sumarsih dkk., 2020).

4. Tesis yang ditulis Dwi Efyanto dengan judul Analisis Penarapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Kurikulum SMK pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini adalah model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa: 1) Penerapan kebijakan merdeka belajar pada kurikulum SMK dengan melaksanakan sistem pendidikan pada ranah input, proses, dan output. 2) Hambatan penerapan merdeka belajar dari ketiga SMK meliputi, a) Pemenuhan kompetensi industri memerlukan peningkatan kompetensi guru yang terprogram, b) Guru belum mempunyai pengalaman lapangan dalam penerapan kompetensi industry, c) Perubahan standar kompetensi industri yang dinamis memerlukan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai; d) Kesulitan memfasilitasi pembelajaran dengan efektif sesuai dengan budaya industry. 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang ada dari penerapan merdeka belajar adalah a) Membuat program kesepakatan kerjasama antara SMK dengan pihak Industri, b) Mengembangkan metode pembelajaran yang mampu menciptakan nuansa kerja seperti di perusahaan, c) Sinkronisasi kurikulum dengan industri rekanan untuk penyusunan kurikulum pembelajaran otomotif; d) Meningkatkan kompetensi guru dalam konteks pemenuhan harapan industry (Dwi Efyanto, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha menganalisis gejala sosial yang bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga jenis penelitian yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Muslimah, dkk dalam bukunya *Cara* mudah membuat proposal penelitian dinyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis deskriptif, (Muslimah, dkk, 2020) sehingga nantinya data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2007).

Lebih lanjut menurut buku panduan penulisan tesis pascasarjana IAIN Palangka Raya penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistic-kontekstual*) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian (Tim Penyusun, 2021).

Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan studi dokumen atau teks yaitu untuk

mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak di Sdit Al-Amin Kapuas . Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002). Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Guntur Setiawan, 2004).

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Sementara itu Rohman yang dikutip oleh Lilianti menyatakan bahwa implementasi merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Lilianti, dkk., 2021).

Suatu implementasi akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- 2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepertaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- 3) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan,

gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih (Arif Rohman, 2009).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Setelah memahami makna dari implementasi tersebut, dalam implementasi kurikulum perlu dipahami makna dari kurikulum itu sendiri, Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Murray Print yang dikutip oleh Dede Rosyada mendefinisikan Kurikulum sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan (Dede Rosyada, 2004).

Menurut Oemar Hamalik, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Oemar Hamalik, 2010). Menurut Sukmadinata, kurikulum mencakup semua pengalaman yang dilakukan siswa, dirancang, diarahkan, diberikan bimbingan dan dipertanggung jawabkan oleh sekolah (Nana Syaodih Sukmadinata, 2003).

Jadi kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004).

Beraskan uraian mengenai makna kurikulum di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar.

Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kurikulum adalah suatu kegiatan yang terencana untuk menerapkan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar.

Komponen Kurikulum

Komponen-komponen Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan Pendidikan, Menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama kurikulum yaitu:

- 1) Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik itu. Dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut.
- 2) Pengetahuan (*knowledge*), informasi, data, aktifitas, dan pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut dengan mata pelajaran.
- 3) Metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru untuk mengajari dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum.
- 4) Metode dan cara penilaian yang dipergunakann dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut (Ramayulis, 2012).

Sedangkan menurut Abdullah Idi, komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen isi dan struktur program atau materi, komponen media atau sarana-prasana, komponen strategi belajar mengajar, komponen proses belajar mengajar, komponen evaluasi atau penilaian (Abdullah Idi, 2007).

Fungsi Kurikulum

Kurikulum dipandang sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Kurikulum dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pendidikan

Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai, sehingga salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang tujuan yang selama ini digunakan oleh setelah bersangkutan (Abdullah Idi, 2007). Di Indonesia ada empat tujuan utama pendidikan yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Dalam pencapain tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan-tujuan tersebut mesti dicapai secara bertingkat, yang saling mendukung, sedangkan keberadaan kurikulum disini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut (Abdullah Idi, 2007).

- 2) Fungsi Kurikulum Bagi Sekolah yang Bersangkutan

Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan ini paling tidak dapat disebutkan dua macam. Pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Manifestasi kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah berupa program pengajaran. Program pengajaran itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang

kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang akan dicapai tersebut disusun secara berjenjang mulai dari tujuan pendidikan yang bersifat nasional sampai tujuan instruksional. Jika tujuan instruksional tercapai (hasilnya langsung dapat diukur melalui kegiatan belajar mengajar di kelas) pada gilirannya akan tercapai pula tujuan-tujuan pada jenjang di atasnya. Setiap kurikulum sekolah pasti didalamnya tercantum tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai melalui kegiatan pengajaran.

Kedua, kurikulum dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dalam pelaksanaan pengajaran misalnya, telah ditentukan macam-macam bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan atau materi pelajaran untuk tiap semester, sumber bahan, metode, atau cara pengajaran, alat dan media pengajaran yang diperlukan. Di samping itu, kurikulum juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis program, cara penyelenggaraan, strategi pelaksanaan, penanggung-jawab, sarana dan prasarana, dan sebagainya (Nurhayati, 2020).

3) Fungsi kurikulum bagi anak didik

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu:

- a) Fungsi penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*) Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
- b) Fungsi integrasi (*the integrating function*) Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadipribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.
- c) Fungsi diferensiasi (*the differentiating function*) Fungsidiferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
- d) Fungsi persiapan (*the propaedeutic function*) Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa

untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

- e) Fungsi pemilihan (*the selective function*) Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberikan kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel.
 - f) Fungsi diagnostik (*the diagnostic function*) Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahannya.
- 4) Fungsi kurikulum bagi pendidik
- a) Sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar para anak didik.
 - b) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan (Abdullah Idi, 2007).
- 5) Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah/Pembina sekolah
- a) Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar.
 - b) Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervise dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak kearah yang lebih baik.
 - c) Sebagai seorang administrator, menjadikan kurikulum sebagai pedoman untuk mendatang. mengembangkan kurikulum pada masa
 - d) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar (Abdullah Idi, 2007).
- 6) Fungsi kurikulum bagi orang tua

Bantuan orang tua murid dalam memajukan pendidikan sangat diperlukan baik berupa konsultasi langsung dengan guru tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan anaknya, maupun bantuan melalui komite sekolah, meskipun orang tua telah menyerahkan anak-anak mereka kepada kepala sekolah agar diajarkan ilmu pengetahuan dan dididik menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi mereka dapat turut serta membantu usaha sekolah demi kemajuan putera-

puterinya, alangkah baiknya kalau mereka mengetahui tentang kurikulum yang dijalankan di sekolah. Dengan demikian partisipasi orang tua dapat menjadi faktor penunjang dan bukan faktor penghambat.

7) Fungsi Kurikulum Bagi Setiap Jenjang Pendidikan

Fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan ialah (a) fungsi kesinambungan, yaitu sekolah pada tingkat yang lebih atas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang dibawahnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum, (b) fungsi penyiapan tenaga, yaitu bilamana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga-tenaga terampil, maka sekolah tersebut perlu mempelajari apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, baik mengenai kemampuan akademik, kecakapan atau keterampilan, kepribadian maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial (Nurhayati, 2020).

8) Fungsi Kurikulum Bagi Sekolah Tingkat di Atasnya

Dalam hal ini kurikulum dapat untuk mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu maka kurikulum pada tingkat diatasnya dapat mengadakan penyesuaian. Misalnya saja, jika suatu bidang studi telah diberikan pada kurikulum sekolah tingkat bawahnya, harus dipertimbangkan lagi pemilihannya pada kurikulum sekolah tingkatan di atasnya terutama dalam hal pemilihan bahan pengajaran. Penyesuaian bahan tersebut dimaksudkan untuk menghindari keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajaran itu. Di samping itu, terdapat juga kurikulum yang berfungsi untuk menyiapkan tenaga pengajar. Bila suatu sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga guru (LPTK), maka lembaga tersebut harus mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat di bawahnya tempat calon guru yang dipersiapkan itu akan mengajar (Nurhayati, 2020).

9) Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah.

Bagi masyarakat kurikulum dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi proses dan *output* yang dihasilkan oleh kurikulum tertentu, sehingga masyarakat dapat bekerjasama dan memberi masukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kurikulum di masa depan, yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna (*user* atau *stakeholder*) (Nurhayati, 2020).

Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan amanat Negara dalam

memberikan hak dan pemerataan Pendidikan kepada seluruh warga negara (Fahrian Firdaus Syafi'i, 2021).

Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang mengedepankan pengembangan hasil belajar peserta didik dimana didalam sekolah penggerak mengaitkan salah satu tema yakni Profil Pelajar Pancasila. Sesuai dengan namanya, maka dalam sekolah penggerak ini menggunakan kurikulum yang didalamnya mencakup salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Aspek tersebut adalah berkaitan dengan kompetensi (mencakup kegiatan literasi dan numerisasi) serta karakter yang mana kedua aspek tersebut dilakukan dengan melihat sumber daya manusia yang unggul (Auliya Javanisa dkk., 2021).

Lebih lanjut menurut Fahrian Firdaus Syafi'i sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter). Sebagai catatan bahwa kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan Pendidikan lain. Kemudian menteri Pendidikan, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa sekolah penggerak adalah katalis. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yakni; Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila dan diawali dengan Sumber Daya Manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru) (Fahrian Firdaus Syafi'i, 2021).

Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan paea pemangku kepentingan. Kemudian profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yang diantaranya; 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, 2) Berkebinekaan Global, 3) Mandiri, 4) Bergotong royong, 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif. Keenam dimensi tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang mendukung dan berkesinambungan satu sama lain (Fahrian Firdaus Syafi'i, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sekolah penggerak adalah sekolah yang mengedepankan pengembangan hasil belajar peserta didik dimana didalam sekolah penggerak mengaitkan salah satu tema yakni Profil Pelajar Pancasila yaitu menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan paea pemangku kepentingan.

Tujuan Sekolah Penggerak

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu

terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga. Kemenristekdikti merumuskan tujuan dari sekolah penggerak dalam Keputusan Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
- 2) Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas.
- 3) Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas.
- 4) Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

Diharapkan dengan adanya mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak agar penyelenggaraan sesuai dengan yang diharapkan.

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Ruang Lingkup Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini meliputi:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak.
- b. penetapan provinsi/ kabupaten/ kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak
- c. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak
- d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
- e. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan;
- f. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
- g. sanksi (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

Struktur Kurikulum Sekolah Penggerak tingkat SD

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Dalam kurikulum sekolah penggerak pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- 1) Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler

- 2) Projek penguatan profil pelajar Pancasila (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

Kegiatan pembelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran mengarah pada CP dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis projek dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila diatur sebagai berikut:

- 1) Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Tidak diarahkan untuk mencapai target CP tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran
- 3) Merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler
- 4) Peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas projeknya, sementara guru atau pendidik PAUD berperan sebagai fasilitator (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

Untuk satuan Pendidikan SD, Struktur kurikulum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) Fase:

- 1) Fase A untuk Kelas I dan Kelas II.
- 2) Fase B untuk Kelas III dan Kelas IV.
- 3) Fase C untuk Kelas V dan Kelas VI.

Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di Fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) belum menjadi mata pelajaran wajib di Fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal Fase B (Kelas III). Mata pelajaran IPAS merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan (sains), baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Ketika mempelajari lingkungan sekitarnya, peserta didik SD melihat fenomena alam dan sosial sebagai suatu kesatuan secara umum, dan mereka mulai berlatih membiasakan diri untuk mengamati atau mengobservasi, mengeksplorasi, dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inkuiri lainnya yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebelum mereka mempelajari konsep dan

topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS yang akan mereka pelajari di SMP (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

Satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan CP dan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana telah disampaikan di awal, proporsi beban belajar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD, dialokasikan sekitar 20% (dua puluh persen) beban belajar per-tahun. Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan Bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan/atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan/atau bimbingan orang tua. Sedangkan mata pelajaran Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dapat diselenggarakan berdasarkan keputusan pemerintah daerah (Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Langkah yang di lakukan dalam Implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas yaitu membuat perencanaan, membuat tujuan, membuat program pendukung, melakukan pengawasan, mengevaluasi keberhasilan.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas, di antaranya 1) Kesiapan pendidik, 2) Kesiapan tenaga kependidikan, 3) Keadaan sarana dan prasarana pendukung, 4) Kesiapan peserta didik, 5) Dampak implementasi.
3. Perlunya langkah atau Penanganan khusus yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kurikulum agar keefektifan implementasi kurikulum sekolah penggerak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Amin Kuala Kapuas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga dkk, Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu Vol 6 No 4 Tahun 2022*.
- Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Efyanto, Dwi, Analisis Penarapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Kurikulum SMK, *Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang*, 2021.
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV; 2010.
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007.
- Javanisa, Auliya dkk., Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik. *Jurnal Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*, 2021.
- Kemendikbud. Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar. www.kemdikbud.go.id, (diakses pada 20 Agustus 2022)
- Lilianti, dkk., Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana, *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.21 No.1 Tahun 2021*.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslimah, dkk, *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*, Palangka Raya, CV. Narasi Nara, 2020.
- Nurhayati, *Telaah Kurikulum*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rahayu, Restu dkk, Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak, *Jurnal Basicedu Vol 6 No 4 Tahun 2022*.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Rohman, Arif, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2009.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Salinan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak bagian Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- Salinan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak Bagian Pedoman Pembelajaran Pada Program Sekolah Penggerak.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Setiawan, Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengendalian Mutu Sekolah Menengah*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sumarsih, Ineu dkk., Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu* Vol 6 No 5 Tahun 2022.
- Syafi'i, Fahrian Firdaus, Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar: Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 25 November 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister*, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2021.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.